

MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS BUDAYA LOKAL MELALUI PRAKTIK PENGAJARAN MATA PELAJARAN AGAMA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA TERNATE

M. RIDHA AJAM¹⁾, FACHMI ALHADAR²⁾, ANDI SUMAR KARMAN³⁾

Prodi Sastra Inggris^{1,2)}, Prodi Antropologi Sosial³⁾, Universitas Khairun

alfachmi.p55@gmail.com²⁾, andisumarkarman@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan model pendidikan multikultural di Kota Ternate berbasis budaya lokal. Dengan menelusuri persiapan dan praktik pengajaran di sekolah dasar umum/negeri dan swasta (agama Islam dan Kristen), nilai-nilai multikultural yang mendukung tumbuhnya sikap toleransi, kebersamaan, dan harmonisasi, menuju masyarakat kosmopolitan, dapat diidentifikasi dan dipahami. Budaya lokal yang berasal dari kebudayaan dan masyarakat Ternate juga diungkapkan dan diuraikan keterkaitannya dengan pendidikan agama di sekolah dan praktiknya di dalam masyarakat pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian mencakup sekolah dasar (SD) di Kota Ternate. Masing-masing sebanyak satu SD Negeri (Umum), dan masing-masing satu sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan agama Kristen. Informan sebanyak 16 orang meliputi kalangan guru agama/kepala sekolah, siswa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Islam dan Kristen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumen (literature study). Secara akademik, upaya mengungkap dan menjelaskan faktor sosiobudaya dalam proses pengajaran agama di sekolah diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan keilmuan bidang sosiobudaya. Secara praktis, pengungkapan dan pemahaman terhadap gejala yang diteliti ini berkontribusi bagi pengelolaan masyarakat multikultural dan pelestarian budaya berdasarkan kearifan lokal masyarakat Ternate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengajaran mata pelajaran agama pada SD di Kota Ternate dilakukan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam praktiknya, guru agama atau pihak sekolah, selain mengacu kepada kurikulum nasional, guru atau pihak sekolah juga menambahkan mata pelajaran lain dalam bentuk ekstrakurikuler. Interaksi antara guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar ruangan kelas, berlangsung intensif. Nilai-nilai budaya lokal dari kebudayaan masyarakat Ternate tampaknya telah dipraktikkan, meski masih perlu digalakkan lagi dan secara formal diintroduksi melalui pelajaran Muatan Lokal.

Kata Kunci :Islam, Toleransi, Eksklusivisme Agama, Multikultural, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Agama, baik sebagai doktrin, ideologi, maupun praktik telah menjadi wacana yang nyaris kita saksikan sebagai fenomena yang lazim dan erat terkait dengan berbagai sisi kehidupan kita. Secara personal, agama merupakan wilayah privat yang menghubungkan seseorang dengan Tuhan yang disembah menurut keyakinannya. Di titik ini, agama sebagai pengalaman pribadi penganutnya telah selesai diperbincangkan. Agama menjadi menjadi problematis, atau setidaknya menjadi perbincangan khalayak ketika dibicarakan dalam konteks hubungannya dengan manusia (masyarakat) lain baik sesama penganut agama yang sama maupun dari agama atau keyakinan yang berlainan. Kita ambil contoh, bagaimana pemilihan kepala daerah atau presiden menggunakan isu agama sebagai instrumen untuk

mempengaruhi pilihan masyarakat. Dari sisi doktrin (ajaran), sudah tentu agama tidak menganjurkan penghancuran terhadap manusia lain sesama atau berbeda agama. Dalam praktiknya, hal ini dapat kita jumpai mulai dari penghancuran identitas (jatidiri) seseorang atau penganut agama tertentu hingga penghancuran fisik. Ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaktepatan pemahaman beragama dan proses penanaman nilai agama, baik pada level keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Karena proses pelembagaan agama, tepatnya nilai-nilai keagamaan, melibatkan berbagai aspek: sosil budaya, ekonomi, politik, maka institusi penyelenggara pendidikan agama perlu diungkap dan dipahami dalam konteks sosil budaya masyarakatnya.

Dalam kerangka pembinaan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia menghadapi salah satu isu penting, yakni inklusi sosial (Latif, 2019). Hal ini dilihat melalui (i) semakin menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas-kelas sosial, (ii) menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras, dan agama, dan (iii) lemahnya budaya kewargaan. Agama, atau keagamaan, seharusnya menjadi menjadi faktor pendukung bagi terwujudnya inklusi sosial di Indonesia. Jika ada agama dipandang sebagai hambatan bagi terwujudnya masyarakat inklusif di negara ini, maka sangat penting bagi kita untuk mengungkap dan memahami bagaimana agama dilembagakan melalui pendidikan di sekolah. Hal ini penting dilakukan di berbagai tempat di Indonesia karena konteks sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Singkatnya, agama dan kondisi multikultural masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan dua kenyataan dalam satu ruang dan waktu yang sama.

Penelitian Syamsiyatun (2019) mengenai pendidikan agama di Indonesia menunjukkan lima tren, yakni: bersifat eksklusif, doktriner, teologis, homogen; minim integrasi dan koneksi dengan sejarah panjang agama-agama dan budaya setempat; kurang memberi ruang perjumpaan dengan pemeluk agama yang lain; berdampak pada gagap, gugup, tuna respek, dan tuna empati terhadap mereka yang liyan, khususnya agama; tidak adekuat untuk menjadi pemimpin atau pengambil kebijakan publik di tengah masyarakat yang super atau ultra majemuk. Temuan ini merupakan merupakan salah satu alasan mengapa konsorsium pendidikan dengan pendekatan saling terhubung antara teologi, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu humaniora dan sains, dibentuk dengan nama ICRS—singkatan dari Indonesian Consortium for Religious Studies. Meski ICRS dibentuk pada level pendidikan tinggi, tetapi temuan tersebut, setidaknya berdasarkan penelitian Syamsiyatun, menunjukkan proses dan hasil dari penyelenggaraan pendidikan kita secara umum.

Jika kita mencermati fenomena kehidupan berbangsa belakangan, tampak bahwa agama menjadi bagian dari proses politik di Indonesia. Respons, dukungan, keberagaman, atau hubungan dengan jaringan berbasis agama dapat meningkatkan dukungan kepada seseorang dalam konteks politik. Sebaliknya, dengan faktor yang sama pula, seseorang terjungkal dari posisi politik yang semula menempatkannya di “titik aman” secara politis. Terlepas dari penggunaan isu agama sebagai wacana, ideologi, ataupun praktik, namun faktanya agama kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Fenomena ini dengan nyata dapat dijumpai sejak pemilihan kepada daerah DKI. Jakarta hingga pemilihan umum 2019 yang baru saja diselenggarakan pada 17 April 2019 silam. Jika kita menerima temuan Syamsiyatun (2019) di atas, maka perilaku politisi dan respon warga negara lainnya dapat dikatakan hasil dari proses pendidikan agama yang diperoleh selama ini. Meski demikian, institusi pendidikan formal (sekolah) tidak menanggung hal ini sepenuhnya karena perilaku umat agama tertentu (masyarakat) tak terlepas dari konteks sosial di mana agama dan masyarakat tersebut tumbuh (Kuswanjono, 2019).

Indonesia merupakan negara majemuk dari segi agama, suku bangsa, golongan, dan ras. Kemajemukan Indonesia dalam hal ini dilihat dari segi keanekaragaman budaya dari masyarakat. Penelitian ini terutama menilik keanekaragaman Indonesia dari segi agama yang dianut masyarakat yang mencakup doktrin dan ideologi beserta praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, agama dilihat sebagai wahana penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta sekaligus penuntun hubungan antara manusia satu dengan lainnya, baik sesama penganut agama maupun dari umat agama lain. Pemahaman terhadap keanekaragaman masyarakat dan bangsa Indonesia ini harus terwujud dalam tata kelola

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai sejak dini. Anak-anak bangsa dari penganut agama tertentu sejatinya mendapatkan pendidikan agama dengan sistem pengajaran yang peduli pada keragaman bangsa melalui penanaman karakter.

Konsep pendidikan umum (*general education*) dan kondisi majemuk masyarakat Indonesia, menurut Kuswajono (2019) menghadapi beberapa permasalahan. Secara filosofis, pendidikan kita lebih banyak mengembangkan ilmu praktis daripada humaniora. Selain itu, kita juga lebih menekankan progresivisme ketimbang optimalisasi pendidikan nilai-nilai. Dari sisi penyelenggaraan, problem pendidikan kita menurut Kuswajono (2019), mencakup: tidak mempertimbangkan psikologi perkembangan anak; belum mengoptimalkan kecerdasan holistik: olah raga, olah pikir, olah rasa dan karsa, dan olah spritual; berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi yang justru terpapar setelah mengikuti pendidikan agama. Dari sisi kebijakan (pendidikan), Kuswajono (2019) melihat adanya kebijakan yang berubah-ubah. Sekolah merupakan institusi formal dari proses pendidikan manusia. Perilaku seseorang, sebagai bagian dari kebudayaannya, merupakan hasil belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, sekolah mengemban tugas untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang harus peduli terhadap upaya mencegah perilaku kekerasan atau perilaku tidak terpuji lainnya secara dini. Hal ini dilakukan melalui program pendidikan damai, sikap toleransi, empati, yang ditanamkan secara dini kepada peserta didik (Wahyu, 2017: 3). Proses pendidikan yang lebih mengutamakan aspek kognitif ketimbang afektif termasuk menjadi penyebab lemahnya aktualisasi nilai-nilai dan praktik humaniora. Karena pendidikan karakter dan kepribadian yang kuat dapat dilihat melalui sikap tertib, mandiri, menghormati orang lain, perhatian dan kasih sayang, bertanggung jawab, adil, berperan sebagai warga negara yang baik, dan mendahulukan kepentingan khalayak (Wahyu, 2017: 4). Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka penyelenggaraan pendidikan di SD dapat ditinjau untuk memahami bagaimana proses pembelajaran diselenggarakan dengan muara pada penanaman karakter positif, seperti disebut di atas.

Penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia menghadapi permasalahan mencakup problem filosofis, problem kebijakan, dan problem praktis penyelenggaraan (Kuswajono, 2019). Dengan memahami problem filosofis dan kebijakan, maka fokus problem praktis penyelenggaraan, yang dikaitkan dengan kondisi multikultural bangsa Indonesia. Karena itu, permasalahan penelitian secara umum difokuskan bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah dasar (SD) keagamaan Islam dan Kristen di Kota Ternate. Secara khusus, pertanyaan penelitian meliputi sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses perencanaan pengajaran agama Islam dan Kristen di SD di Kota Ternate?
2. Bagaimanakah proses praktik pengajaran agama Islam dan Kristen di SD?
3. Apa saja nilai-nilai multikultural berbasis budaya lokal di Maluku Utara dalam pelajaran agama Islam dan Kristen di SD?

Dua topik utama dalam penelitian adalah agama dan masyarakat multikultural. Topik agama terutama ditinjau dari aspek penyelenggaraan pendidikan, meski tak bisa dilepaskan dari perilaku dan dampaknya terhadap lingkungan sosial di mana agama dipraktikkan berdasarkan tafsir dan keyakinan penganutnya. Di dalam lingkungan sosialnya, umat suatu agama merupakan bagian dari masyarakat multikultural yang menjadi bagian dari penyusun keragaman bangsa Indonesia.

Multikulturalisme

Konsep masyarakat plural (*plural society*) seringkali disamakan dengan masyarakat multikultural (*multikultural society*). Kedua konsep ini penting dibedakan karena implikasinya terhadap bentuk masyarakat yang dihasilkan berdasarkan corak hubungan di antara masyarakat dan budaya. Pada masyarakat plural, interaksi dan komunikasi masyarakat dan budaya berlangsung sendiri-sendiri, tidak intensif. Corak hubungannya dominatif dan diskriminatif. Karena itu, sulit dicapai suatu kondisi

tatatanan sosial yang harmonis dalam masyarakat plural. Hal berbeda ditunjukkan pada masyarakat multikultural.

Mengutip Fay, Lubis (2004: 121) mengemukakan multikulturalisme sebagai suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam masyarakat multikultural, berbagai perbedaan budaya, etnis, lokalitas, bahasa, ras, bangsa, dan lain-lain dilihat sebagai mozaik yang memperindah masyarakat. Prinsip keanekaragaman, perbedaan, kesederajatan, persamaan, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, dan solidaritas merupakan ideologi yang diperjuangkan dan dijunjung tinggi. Dalam masyarakat multikultural, interaksi antara masyarakat dengan berbagai kebudayaan berbeda-beda tersebut berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan tercapai di antara berbagai perbedaan budaya tersebut karena dipandang dan ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar dan setara.

Selanjutnya, menurut Lubis (2004:128), beberapa studi dan penelitian multikultural yang dilakukan di Indonesia diharapkan dapat membantu mengembangkan prinsip demokrasi, persamaan, dialog, dan solidaritas yang diperlukan bagi kehidupan yang lebih nyaman dengan saling menghormati antarberbagai etnis, budaya, agama, dan ras dalam abad informasi dan globalisasi sekarang ini. Dengan menggunakan konsep masyarakat multikultural, dan seturut dengan pandangan Lubis di atas, penelitian ini menelusuri praktik pengajaran agama di sekolah untuk menyusun model harmonisasi masyarakat multikultural.

Christine Inglis (1996) menyebutkan tiga makna multikulturalisme. Pertama, berdasarkan gambaran demografinya, multikulturalisme mengacu pada kenyataan adanya keragaman etnis dan budaya. Kedua, dalam nuansa normatif-ideologis, multikulturalisme menggunakan argumen filosofis yang menggarisbawahi legitimasi, pengakuan terhadap klaim-klaim kesadaran, dan penerimaan atas kelompok-kelompok identitas partikular. Ketiga, multikulturalisme dalam nuansa pragmatisme berkaitan dengan kerangka politik yang dibuat untuk merespons dan menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh keragaman. Terkait dengan ini, Ubaidillah (2002) mengemukakan bahwa ada juga yang lebih mengkhususkan hanya pada isu-isu menyangkut keragaman etnis, kebudayaan, dan artikulasi-artikulasi politiknya. Menurutnya, politik multikultur berkenaan dengan pengambilan kebijakan pemerintah bagi publik (*public policy*) atas merebaknya permasalahan yang mengiringi keragaman. Permasalahan ini dapat mencakup konflik antara pendatang dan pribumi sebagai akibat migrasi, perselisihan atau rekonsiliasi etnis ataupun ras, kekerasan, akulturasi, asimilasi budaya, ketegangan antar-agama dan bahasa.

Masalah multikulturalisme menjadi perhatian utama para ahli antropologi di Indonesia. Perhatian serius ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan simposium dan publikasi gagasan melalui jurnal ilmiah dari para ahli tersebut. Sayangnya, publikasi itu tidak banyak ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian lapangan pada berbagai komunitas di Indonesia untuk mengungkapkan kondisi eksistensial beserta perkembangannya. Penelitian yang diajukan ini dimaksudkan untuk menambah khazanah kajian itu dari kondisi yang paling kontemporer dari salah satu komunitas, yakni orang Ternate. Salah satu antropolog Indonesia yang paling gamblang berbicara tentang multikulturalisme adalah Parsudi Suparlan. Secara garis besar, pandangan Suparlan (2000) dapat dibagi ke dalam beberapa garis besar, yakni: konsep masyarakat majemuk (*multikultural*), masyarakat majemuk Indonesia, masyarakat majemuk dan demokrasi masyarakat sipil, dan kesukubangsaan dan ancamanannya bagi otonomi daerah.

Spencer (1994) mengkaji masyarakat multikultural Amerika. Ia memfokuskan kajiannya pada pergulatan identitas kalangan kulit hitam (American Black) dalam konteks politik Amerika. Ia menjelaskan tentang multikulturalisme sebagai sebuah gerakan yang signifikan dan merupakan refleksi terbaru dari keberlanjutan panjang identitas politik di Amerika. Masyarakat Amerika dibentuk oleh persaingan visi nativisme dan liberalisme kosmopolitan. Pertama, identitas Amerika didefinisikan dalam cara pembatasan. Kedua, mengambil pandangan luas tentang identitas Amerika, menekan kebijakan yang berlawanan. Visi baru masyarakat Amerika berkembang sepanjang pasca perang Dunia Kedua dalam wacana perjuangan orang kulit hitam untuk mengatasi sejarah eksklusi mereka dari identitas kultural Amerika. Visi ini diekspresikan dalam gerakan multikulturalisme dan kebenaran politik (*political correctness*) yang dilihat sebagai sesuatu yang baru, tegas secara moral, mengekspos pandangan masyarakat Amerika, bergulir seputar upaya kelompok yang sebelumnya disingkirkan untuk membangun identitas baru. Semua bentuk kesadaran ini—nativisme, liberalisme kosmopolitan, dan multikulturalisme—kini bersaing dalam identitas politik Amerika.

Pendidikan Agama di Indonesia

Kuswanjono (2019) mengungkapkan adanya tiga permasalahan pendidikan umum (*general education*) di Indonesia, meliputi: *problem filosofis*, *problem kebijakan*, dan *problem praktis penyelenggaraan*. Secara filosofis, permasalahan pendidikan kita adalah (1) lebih banyak mengembangkan ilmu praktis daripada humaniora, dan (2) lebih menekankan progresivisme ketimbang optimalisasi pendidikan nilai-nilai. Dari sisi penyelenggaraan, *problem pendidikan* kita (1) tidak mempertimbangkan psikologi perkembangan anak; (2) belum mengoptimalkan kecerdasan holistik: olah raga, olah pikir, olah rasa dan karsa, dan olah spritual; (3) berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi yang justru terpapar setelah mengikuti pendidikan agama. Dari sisi kebijakan adalah cenderungnya berubah-ubah kebijakan pendidikan kita.

Mulia (2019) mengaitkan antara agama dan permasalahan kemanusiaan. Dalam kaitan kedua hal ini, ia menyatakan bahwa kemanusiaan belum menjadi bagian terpenting dari sikap dan perilaku beragama di Indonesia. Hancurnya nilai-nilai kemanusiaan ditunjukkan melalui fenomena: kerusakan moral manusia (*narkoba*, *drugs*, *nepotisme*, *korupsi*, *pungli*, *money politic*), *fundamentalisme* dan *terorisme*, *konsumerisme* dan *hedonisme*, *imperialisme* dan *kolonialisme*, dan kerusakan lingkungan. Untuk menjadikan agama kembali mendominasi perannya sekaligus mengukuhkan martabat manusia, Mulia (2019) mengajukan: (i) pentingnya memaknai ulang agama dan kewarganegaraan di Indonesia, (ii) mengimplementasikan *golden rule* (*aturan emas*) atau etika timbal balik (*the ethic of reciprocity*) sebagai pesan abadi agama-agama, (iii) mengukuhkan sikap kosmopolitanisme, yakni paham yang menekankan bahwa manusia yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai. Candra (2019) menggagas tentang pendidikan sekolah menyenangkan melalui Gerakan Sekolah menyenangkan (GSM). Berangkat dari perjalanan pribadi dan pengamatannya terhadap potret pendidikan di Indonesia ia mewujudkan gagasannya ini dengan menerapkan *prose pembelajaran* yang dianggapnya lebih humanis. Menurutnya, *paradigme pendidikan agama* di Indonesia lebih *behavioristik* daripada *humanistik*. Karakter pendidikan humanistik meliputi: (i) *kemedekaan* memilih perilaku dengan mengetahui konsekuensi, (ii) penekanan pada pemaknaan/refleksi pada kegiatan keagamaan, (iii) perilaku atas dasar olah pikir (*nalar/pemaknaan*), olah rasa (*refleksi dan empati*), dan olah laku, (iv) tujuan hidup untuk memberi manfaat pada kehidupan dan membangun peradaban sosial.

Mahathera (2019) mengungkapkan tentang pendidikan dan perubahan sosial dari perspektif dan pengalaman agama Budha. Ia menunjukkan Dhamma sebagai sekumpulan nilai tentang pendidikan dalam agama Budha yang mencakup pariyatti (learning to know), patipatti (learning to do), pativedha (learning to be), dan learning to live together (continuous education for all). Konsep Saudara (kalyan amitta) dapat mencapai sikap bijaksana dan kesadaran sosial setelah melalui proses-proses internal dan eksternal berserta latihan-latihan di dalamnya. Kondisi "Saudara yang Baik" menjadi inisiator awal sekaligus hasil yang diperoleh dari pencapaian dan pengembangan Dhamma.

Beberapa pustaka yang ditinjau di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diusulkan ini. Dari segi kesamaan, penelitian ini sama-sama meninjau isu agama dan kondisi multikultural masyarakat Indonesia. Perbedaan usulan penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian yang telah ditunjukkan di atas mencakup pendekatan dan metode studi. Usulan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode perbandingan antara dua jenis agama yang diajarkan yakni Islam dan Kristen secara bersamaan (studi komparatif).

Sejarah Singkat Budaya Kota Ternate

Kata Ternate berasal dari bahasa lokal yaitu "Tara no ate" artinya "turun kau pikat" (Crab, 1878). Maksudnya, turun dari tempat yang tinggi ke dataran rendah atau dari Formadiayahi ke Sampalo untuk memikat para pendatang supaya mau menetap di pesisir pantai pulau Ternate. Maksud dari kata "ka bawah" (ke bawah) dalam bahasa Ternate yaitu "tara", yang dituju adalah negeri Sampalo di daerah pesisir laut Gam Lammo (kampung besar). Kemudian setelah kedatangan Portugis pada 1512, di tempat ini dibangun sebuah benteng bernama Nostra Senora del Rosario. Meskipun masyarakat pribumi telah berdiam di pesisir, mereka meyakini bahwa pusat pemerintahan tertinggi berada di di Foramadiayahi, di mana kolano (pemimpin) berada dan sebagai pusat kerajaan Ternate yang pertama (Masinambow, 1987). Francois Valentijn (1724) dan Naidah (1878), menyebutnya Fala Majahi, adalah pemukiman di mana dibentuknya kerajaan Ternate melalui penggabungan empat negeri atau soa, yaitu Foramadihay, Tuboleo (Sampalo), Tobona, dan Tobanga.

Kota Ternate termasuk salah satu kota tertua di Nusantara (Indonesia). Kota ini telah ada sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat imperium agama Islam terbesar di timur Indonesia. Kota yang dikenal juga sebagai "Al Mullukiah" ini berperan sebagai kota perdagangan dan pusat pemerintahan (W. PH. Coolhas, 1926). Setelah kedatangan orang Eropa (Portugis dan Spanyol) pada abad XVI, pergolakan politik pun terjadi di kalangan bangsawan tradisional Ternate. Setelah terbunuhnya Sultan Khairun, Sultan Babullah (1570-1584) melakukan perlawanan dan berhasil menaklukkan orang Portugis dan menguasai benteng Nostra Senora del Rosario.

Sebelum keraton Ternate berada pada tempatnya yang sekarang (Limau Jore-Jore), awalnya berada di Foramadiyahi yang aktif pada pertengahan abad XIII, yaitu tahun 1257. Kemudian perpindahan yang kedua menurut Valentijn (1724) adalah ke wilayah Tuboleo (Sampalo) di wilayah ini tidak bertahan lama karena sering terjadi penyerangan dari Kerajaan Tidore dan Spanyol, terhadap Ternate dan tidak ada sumber yang menjelaskan lebih detail tentang Sampalo. Setelah itu keraton Ternate berpindah ke arah utara yaitu ke Jore-Jore (sekitar Ngade Sone, sekarang kelurahan Kasturian) pada 1627 oleh Sultan ke-30. Perpindahan keraton Ternate berdasarkan pertimbangan strategi politik dan ekonomi. Namun dalam catatan atau laporan pemerintah yang tercatat dalam Kolonial Verslaag (KV, 1809), perpindahan ke wilayah yang sekarang adalah pada tahun 1806. Selain itu disebutkan dalam laporan G.K.

Schutte (1626-1795), bahwa pemerintahan kerajaan Ternate, juga pernah berpusat tidak jauh dari benteng Melayu, sebuah tempat yang menjadi ibukota bagi orang-orang Ternate dengan Sultan Mudafar atau Muzaffar (1610-1627), yang telah menandatangani kontrak politik dengan VOC atas koordinasi Cornelis Matelief de Jonge, dan diperintahkan untuk membangun sebuah benteng yang disebut benteng Oranje. Sebagai imbalan bagi monopoli cengkih, VOC menjanjikan perlindungan kepada kerajaan Ternate, untuk melumpuhkan perdagangan cengkih yang telah dikuasai oleh orang Spanyol yang berada di benteng Nostra Senora del Rosario.

Wilayah administratif Kota Ternate seluas 5.709,72 km² yang terdiri atas 162,17 km² daratan dan 5.547,55 km² lautan. Wilayah utara kota ini berbatasan dengan Laut Maluku, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Di sebelah timur, Kota Ternate berbatasan dengan Pulau Halmahera dan sebelah barat dengan Laut Maluku dan Laut Sulawesi.

Secara administratif, Ternate menjadi Kotamadya pada 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999. Peningkatan status Ternate dari Kota Administratif menjadi Kotamadya ini bersamaan dengan pembentukan provinsi Maluku Utara. Kota Administratif Ternate, sebelum UU ini, Ternate masih berada di bawah binaan Daerah Maluku Utara. Pada awalnya Kota Ternate hanya terdiri atas tiga kecamatan dan 58 kelurahan. Selanjutnya, pada 2001, Kota Ternate dimekarkan menjadi empat kecamatan. Lalu, pada tahun 2009, Ternate dimekarkan lagi dan menjadi tujuh wilayah kecamatan. Selanjutnya, pada 2018, Kota Ternate berkembang menjadi delapan kecamatan berdasarkan Peraturan daerah Kota Ternate Nomor 1 tahun 2018. Kondisi administratif ini masih berlangsung hingga sekarang (2019).

Kota Ternate terdiri atas delapan kecamatan yang mencakup sebanyak 78 kelurahan. Pusat pemerintahan Kota Ternate terletak di Pulau Ternate, yang merupakan pulau terbesar di wilayah kota ini. Di pulau ini, terdapat lima kecamatan, yakni: Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Utara, Ternate Tengah, dan Ternate Barat. Tiga kecamatan lainnya terletak di luar Pulau Ternate. Kecamatan terjauh dari ibu kota adalah Kecamatan Pulau Batang Dua, yakni 121,6 km. Kecamatan ini terletak di Pulau Mayau dan Tifure.

Wilayah pemerintahan Kota Ternate meliputi delapan pulau, yakni: pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, Tifure, Makka, Mano, dan Gurida. Pulau terluas adalah Pulau Ternate, yakni 101,5730 km². Pulau terluas berikutnya dengan luas yang hampir sama adalah Pulau Moti (24,7741 km²) dan Pulau Mayau (24,1629 km²). Pulau paling sempit adalah Pulau Makka (0,0130 km²) dan Pulau Mano (0,0004 km²). Pulau Hiri dan Pulau Tifure masing memiliki luas 24,87741 km² dan 4,5915 km².

Hingga tahun 2018, proyeksi penduduk Kota Ternate berjumlah 228.105 jiwa. Sebanyak 115.891 jiwa di antaranya adalah laki-laki dan perempuan sebanyak 112.214 jiwa. Jumlah meningkat sebesar 2,24 persen dari tahun 2016. Angka rasio jenis kelamin (jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan) pada tahun 2018 adalah 103,28. Sebagian besar penduduk Kota Ternate berada pada tingkatan usia produktif, atau pada rentang usia 15-64 tahun, yang berjumlah 69,19 persen dari seluruh populasi. Penduduk berusia 65 ke atas hanya 2,59 persen saja. Kepadatan penduduk Kota Ternate hingga tahun 2018 adalah 1.407 jiwa/km². Kepadatan penduduk tidak merata di seluruh kecamatan. Bahkan, kepadatannya dapat dikatakan timpang. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Ternate Tengah yang mencapai 4.824 jiwa/km². Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah terletak di Kecamatan Pulau Batang Dua yang hanya sebesar 105/km². Ketimpangan yang tampak pada kepadatan penduduk di antara kecamatan ini dipengaruhi oleh letak

dan fungsi kecamatan bagi Ternate. Kecamatan Ternate Tengah merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi bagi Kota Ternate. Kecamatan Pulau Batang Dua termasuk jauh letaknya dari ibu Kota Ternate.

Kondisi Pendidikan

Peranan sektor pendidikan bagi pembangunan bangsa sangat penting. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya: anggaran pendidikan, kualitas guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemerataan pendidikan, dua hal penting adalah jumlah guru dan ketersediaan prasarana secara memadai.

Hingga tahun 2018, kondisi penduduk Kota Ternate yang berusia 7-24 tahun yang masih bersekolah adalah sebesar 76,88 persen. Khusus pada kalangan perempuan terdapat sebanyak 79,69 persen yang masih bersekolah pada usia 7-24 tahun ini. Pada kalangan laki di rentang usia ini, sebanyak 74,10 persen masih bersekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi kalangan perempuan terhadap pendidikan lebih tinggi dari pada penduduk laki-laki.

Sekolah Dasar (SD) di Kota Ternate yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 2018 adalah sebanyak 87 sekolah. Sebanyak 73 sekolah merupakan SD Negeri. Sisanya, sebanyak 14 sekolah berstatus SD Swasta.

Jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di bawah Kementerian Agama hingga tahun 2018 di Kota Ternate adalah sebanyak 14 sekolah. Sebagian besar sekolah ini tersebar di MI Swasta, yakni sebanyak 11 sekolah. Hanya terdapat 3 sekolah MI yang berstatus MI Negeri.

Keragaman Budaya

Masyarakat Ternate terdiri dari berbagai latar belakang asal-usul, suku bangsa (etnis), dan agama. Kota Ternate yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara, sebelum berpindah ke Sofifi, memiliki faktor penarik bagi penduduk dari berbagai daerah. Tidak hanya dari dalam Maluku Utara, melainkan penduduk dari luar Maluku Utara seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa, Sumatra, Maluku, dll. Karena itu, tidak mengherankan jika di Ternate dijumpai orang Bugis, Makassar, Manado, Sangir, Buton, Jawa, Ambon, Batak, Minagkabau, Arab, Tionghoa, dll. Agama yang dipeluk penduduk Ternate juga meliputi Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Budha. Dua agama besar yang banyak dianut masyarakat kota ini adalah Islam dan Nasrani.

Perjumpaan berbagai kebudayaan dari masyarakat di Kota Ternate menjadikan kota ini serupa mozaik budaya yang terjalin dari aneka rupa kebudayaan masyarakat tersebut. Meski demikian, seperti disebutkan sebelumnya, kebudayaan lokal Ternate tetap dominan dan menjadi warna utama kebudayaan di kota ini.

Kota Ternate merupakan pusat pendidikan, ekonomi, dan politik. Masyarakat dan berbagai daerah datang ke Ternate, baik sebagai pengguna layanan pendidikan maupun sebagai pekerja di sektor pendidikan. Dalam bidang ekonomi, terutama sektor ekonomi informal, kota Ternate memiliki daya pikat tinggi. Kedatangan orang Bugis, Buton, Jawa, dan Sumatra, misalnya, terutama dengan dorongan motif ekonomi. Mereka menjadi penjual yang banyak dijumpai pada sektor informal kota ini.

Uraian singkat di atas menunjukkan betapa keragaman di Kota Ternate tergolong cukup tinggi. Keragaman ini semakin terasa karena berlangsung dalam ruang fisik yang sebenarnya tak terlalu luas. Karena itu, pengelolaan keragaman

masyarakat dan budayanya merupakan tantangan masa depan yang harus dipertimbangkan sejak kini.

Agama

Di Kota Ternate terdapat sebanyak enam agama yang dianut oleh warga kota ini. Agama-agama tersebut meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam penelitian ini, agama Kristen yang dimaksud adalah Protestan dan Katolik. Berdasarkan jumlahnya, penduduk beragama Islam sebanyak 210.050 jiwa, Protestan sebanyak 6.449 jiwa, Katolik sebanyak 733 jiwa, Hindu sebanyak 46 jiwa, Budha sebanyak 107 jiwa, dan Konghucu sebanyak 133 jiwa.

Kecamatan dengan penduduk Islam terbanyak terdapat di Kecamatan Ternate Selatan. Sebaliknya paling sedikit terdapat di Kecamatan Pulau Batang Dua. Di Pulau Batang Dua penduduk mayoritas menganut agama Protestan (2.927 jiwa) dan Islam sebanyak 17 jiwa serta katolik sebanyak 7 jiwa. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kecamatan dengan penduduk Kristen terbanyak di Kota Ternate adalah Kecamatan Batang Dua. Dengan demikian, kecamatan ini termasuk homogen dari segi agama yang dianut warganya.

Penganut agama Budha dan Konghucu hanya ada di Kecamatan Ternate Selatan dan Ternate Tengah. Di Kecamatan Ternate Utara, sama sekali tidak terdapat penduduk yang menganut agama Konghucu, meski kelima agama lainnya ada dengan jumlah yang bervariasi.

Dari delapan kecamatan di Kota Ternate, kecamatan yang paling beragam daei segi agama adalah Kecamatan Ternate Tengah. Di kecamatan ini terdapat semua agama yang dianut oleh masing-masing warga. Berdasarkan agama yang dianut, warga Kecamatan Ternate Tengah terbagi ke dalam 56.415 jiwa Islam, 2.000 jiwa Protestan, 568 jiwa Katolik, 13 jiwa Hindu, 92 jiwa Budha, dan 109 Konghucu. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ternate Tengah. Keragaman agama yang dianut warga Kecamatan Ternate Tengah berimplikasi pada ketersediaan sarana pendidikan berupa sekolah dengan penekanan pada pengajaran agama tertentu, Islam atau Kristen. Beberapa anak-anak dari kalangan penganut agama Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu bersekolah di SD Rajawali Katolik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama: Pengajaran dan Praktik Sosial

Hubungan antara agama dan permasalahan kemanusiaan dinyatakan oleh Mulia (2019) dengan “belum menjadi bagian terpenting dari sikap dan perilaku beragama di Indonesia.” Hal ini menyebabkan, menurut Mulia, hancurnya nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan melalui fenomena: kerusakan moral manusia, munculnya sikap dan tindakan fundamentalisme dan terorisme, konsumerisme dan hedonisme, imperialisme dan kolonialisme, dan kerusakan lingkungan.

Pembentukan sikap, perilaku, dan tindakan anak dimulai dari institusi pendidikan formal, selain keluarga secara informal. SD 04 Alkhairaat di Kota Ternate mengajarkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pesan-pesan agama, siswa diajarkan tentang kepedulian dan praktik dari rukun Islam, berupa zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini dilakukan melalui pembelajaran agama Islam di sekolah. Selain itu, melalui mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), nilai-nilai ini juga diajarkan kepada siswa. Hal yang menarik dalam penyelenggaraan pendidikan agama, dan mata pelajaran lain, yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, bahwa seorang guru harus menunjukkan keteladanan kepada siswa. Dengan demikian,

seorang guru terlebih dahulu dituntut untuk bersikap, berbuat, dan bertindak sesuai nilai-nilai agama dan sosial sebelum mengajarkan kepada siswanya. Hal di atas sesuai dengan pernyataan informan AK (48 tahun) yang mengatakan:

Pada tingkat SD mata pelajaran agama yang diajarkan adalah nilai-nilai yang bersumber dari Al- Quran dan kisah-kisah para Nabi. Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, diajarkan di mata pelajaran lain. Pesan-pesan yang bersumber pada nilai-nilai agama Islam dianggap penting untuk pengenalan kepada siswa karena terkait dengan Iman. Misalnya sikap peduli, kami ajarkan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, yaitu mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah. Intinya, pada kalangan SD masih dibatasi karena kebanyakan mata pelajaran itu bersumber dari sikap

Pada dasarnya, agama tidak mendoktrin umatnya untuk bersikap ekstrim atau eksklusif terhadap penganut agama berbeda. Nilai-nilai keterbukaan dan harmonis dalam hidup berdampingan merupakan ajaran yang terdapat pada setiap agama. Bahkan, sebelum agama datang dan dipeluk oleh manusia, telah ada dan berkembang nilai-nilai budaya masyarakat tempatan yang menghargai keragaman umat manusia. Pada masyarakat Ternate, *dolo bololo* merupakan sastra lisan bernilai tinggi yang berisi petuah-petuah bijak dalam berbagai ranah kehidupan. Dengan demikian, tradisi budaya dan agama, dalam kehidupan orang Ternate merupakan dua hal yang memiliki kesamaan nilai dalam menjunjung tinggi perbedaan di dalam masyarakat. Informan menyatakan:

... Banyak pengaruh yang datang dari luar, banyak anak-anak mendapat informasi dari internet melalui media sosial, saling memfitnah, saling menghujat satu sama lain, doktrin agama ada ISIS/teroris. Padahal agama tidak mengajarkan itu. Agama mengajarkan kita saling berdampingan satu sama lain dan ini telah tertuang dalam dolobololo "ngone doko lai doko ... Kita hidup di suatu tempat berbeda suku ras, agama, dan golongan marilah kita hidup bersatu dan berramai-ramai bagaikan indahnya seperti kembang. Kembang itu kalau warnanya banyak itu semakin bagus untuk dipandang, kalau satu warna saja tidak bagus dipandang. Oleh karena itu kalau kita hidup berdampingan Muslim sama Kristen sangat bagus dahulu seperti itu. Belakangan dalam pembacaan doa-doa di tempat umumnya keliru, karena pilih kata tidak tepat, misalnya "saya membacakan doa ini secara Islam dan agama lain harap disesuaikan" padahal ini keliru. Seharusnya, "saya membaca doa ini secara Islam dan kepada saudara yang selain Islam mohon disesuaikan."¹

Adanya perilaku ekstrim yang menjelma teroris, atau tergabung ke dalam ISIS, pada dasarnya tidak berasal dari ajaran Islam. Penetrasi teknologi informasi ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat menyebabkan munculnya respons masyarakat dengan menerima atau memahami "informasi" baru tersebut sebagai bagian dari keyakinan Islam. Padahal, menurut informan RD yang merupakan tokoh adat dan sekaligus tokoh agama di Ternate ini, hal itu merupakan kekeliruan. Menurutnya, umat Islam dan Kristen di Ternate sejak dahulu hidup berdampingan secara harmonis. Hal ini juga diungkapkan dalam sastra lisan Ternate, yakni *dolo bololo*.

Agama tidak hanya penting dalam mengajarkan keyakinan dan praktik kepada Tuhan. Secara sosial, agama harus mampu mengukuhkan martabat manusia. Agar agama dapat atau tetap menguat perannya secara sosial, maka

¹ Wawancara H. Ridwan Dero, *Jou Kalem* Kesultanan Ternate, Tokoh Adat masyarakat Ternate

menurut Mulia (2019), perlu dilakukan tiga hal. Pertama, memaknai ulang agama dan kewarganegaraan di Indonesia. Kedua, mengimplementasikan *golden rule* (aturan emas) atau etika timbal balik (*the ethic of reciprocity*) sebagai pesan abadi agama-agama. Ketiga, mengukuhkan sikap kosmopolitanisme.

Penyelenggaraan pendidikan agama melalui mata pelajaran agama Islam, dan mata pelajaran lain yang terkait dengan moral dan kewarganegaraan, misalnya Mata Pelajaran PKn, siswa diajarkan tentang pentingnya saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak saja karena tuntutan pendidikan bagi kebangsaan, tetapi memang tradisi ini telah mengakar dalam kebudayaan leluhur orang Ternate. Informan RD (62 tahun) menuturkan:

Anak-anak SD masih baik moralnya. Pada tingkat SMP dan SMA, moral anak-anak telah terpengaruh, karena era globalisasi anak-anak mendapat informasi sangat cepat dan ini berbahaya kalau tidak diawasi. Doktrin-doktrin agama banyak di internet melalui Youtube, doktrin agama kadang mengklaim Islam itu terbaik dan mendiskrimiasi agama lain. Padahal ada firman yang lain mengakui agama Yahudi dan Nasrani. Kita semua anak-cucu Nabi Adam, anak cucu Adam bukan hanya Islam, tapi kita semua yang ada di dunia ini. Hidup berdampingan dan saling menghargai telah diajarkan oleh leluhur kita.²

Dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam di SD, menurut pandangan tokoh agama Islam di Kota Ternate, perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, anak-anak perlu dididik tentang pentingnya saling menghargai perbedaan agama, etnis, dan nilai kesetaraan. Kedua, guru harus kreatif dan inovatif dalam memformulasikan nilai-nilai multikultural ke dalam pelajaran agama agar siswa tidak kaku dalam memandang perbedaan (keragaman). Ketiga, perkembangan teknologi menuntut pentingnya pengajaran agama secara kreatif sesuai perkembangan zaman.

Dinamika masyarakat yang semakin hari berkembang anak-anak itu penting untuk kita berikan pemahaman terkait pentingnya menghargai satu dengan yang lain terutama kita yang berbeda agama, etnis, dan nilai kesetaraan. Oleh sebab itu, perlu para guru terutama mencari semacam inovasi dan diformulasikan ke dalam pelajaran agama sehingga anak-anak ketika tumbuh besar tidak kaku dalam memandang orang lain itu berbeda.³

Pendidikan agama juga seharusnya dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai lokal dari kebudayaan masyarakat tempatan. Dalam konteks masyarakat Ternate, terdapat *adat se atorang* sebagai sebagai sistem nilai bagi masyarakat Ternate. Nilai-nilai menyangkut sopan santun, tata susila, moral/budi pekerti, taat dan istiqomah, dan percaya kepada diri sendiri, harus menjadi bagian dari pelajaran agama Islam di sekolah. Dalam *adat se atorang*, terdapat banyak kearifan lokal terutama yang berkaitan dengan keharmonisan sosial dalam kehidupan bersama. Selain pendidikan agama Islam, anak-anak sekolah juga harus mendapatkan pelajaran Muatan Lokal yang mengajarkan nilai budaya dan prktiknya dalam kehidupan. Bagi informan RD, hal ini belum diintegrsikan dalam pelajaran agama di SD di Kota Ternate.

Nilai-nilai budaya yang diajarkan di sekolah sangat kental tahun 1970-1980an. Setelah, reformasi ajaran moral yang terdapat pada “adat se atorang” tidak lagi dipelajari, padahal leluhur kita mengajarkan lima nilai:

² Wawancara H. Ridwan Dero, *Jou Kalem* Kesultanan Ternate, Tokoh Adat masyarakat Ternate

³ Wawancara Bpk. H. Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, Pensiunan PNS Kantor Departemen Agama Kota Ternate.

sopan santun, tata kesusilaaan, moral/budi pekerti, taat dan istiqomah, percaya kepada diri sendiri.

Lima nilai ini dahulu diajarkan. Saat ini tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah. Padahal kearifan lokal kita banyak sekali nilai-nilai yang perlu dipelajari oleh anak-anak melalui Muatan Lokal. Nah ini yang tidak ditemukan pada generasi saat ini, jadi tidak ada pembentukan karakter anak secara dini terkait dengan budaya lokal kita.

*Kedepan, pemerintah sudah harus berpikir Muatan Lokal bukan hanya Bahasa Daerah. Tetapi nilai-nilai budaya lokal yang harus diajarkan. Kita memiliki nilai lokal yang banyak dan ini harus diajarkan kepada anak-anak mulai dari tingkat dini. Anak-anak harus tahu ini.*⁴

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak melepaskan diri dari keragaman masyarakat kita. Keragaman yang menunjukkan perbedaan ini seharusnya menjadi berkah bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Agar tidak menjadi bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi mozaik indah bagi bangsa Indonesia. Pembentukan sikap dan pengetahuan serta praktik keseharian dalam kehidupan sosial tentang keragaman masyarakat Indonesia harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Siswa SD merupakan generasi penerus masa depan yang harus mendapatkan pendidikan mengenai keragaman ini.

Seorang tokoh Islam di Ternate, Usman Muhammad (62 tahun), mengungkapkan realitas kehidupan agama dan sosial pada kalangan generasi muda saat ini. Menurutnya, perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menjadi penyebab bagi munculnya perilaku intoleransi bagi anak-anak. Untuk menghindari ekses negatif lebih jauh kepada generasi muda akibat perkembangan teknologi ini, maka informan UM menyatakan perlunya menanamkan nilai-nilai saling menghargai dan nilai-nilai kesetaraan antara satu sama lain. Dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah, guru harus inovatif dalam mengajarkan pendidikan agama Islam. Pernyataan informan UM dapat dilihat seperti berikut ini.

*Sejauh yang saya amati, dinamika masyarakat yang semakin hari berkembang anak-anak itu penting untuk kita berikan pemahaman terkait pentingnya menghargai satu dengan yang lain terutama kita yang berbeda agama, etnis, dan nilai kesetaraan. Oleh sebab itu, perlu para guru terutama mencari semacam inovasi dan diformulasikan ke dalam pelajaran agama sehingga anak-anak ketika ditumbuh besar tidak kaku dalam memandang orang lain itu berbeda, sebab hari ini anak-anak sudah dihadapkan pada perkembangan teknologi yang semakin canggih. Karena itu, di dalam agama juga ada yang disebut "didiklah anakmu sesuai dengan zamannya."*⁵

Melalui data hasil wawancara di atas, dapat diketahui juga perlunya pendidikan yang kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan mengutip ajaran Islam: "didiklah anakmu sesuai dengan zamannya," informan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya dijadikan kendala bagi perkembangan generasi muda. Akan tetapi, lebih dari itu, perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan pembentukan watak generasi muda.

Anak-anak saat ini juga mendapatkan pengaruh dari luar dalam perkembangannya. Anak-anak tidak sepenuhnya mendapatkan pengaruh dari keluarga (orang tua) dan sekolah. Berkembangnya teknologi informasi memberikan

⁴ Wawancara H. Ridwan Dero, *Jou Kalem* Kesultanan Ternate, Tokoh Adat masyarakat Ternate

⁵ Wawancara Bpk. H. Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, Pensiunan PNS Kantor Departemen Agama Kota Ternate.

sumber informasi, dan dengan demikian sumber nilai juga, kepada anak-anak. Melalui media sosial di internet, anak-anak mendapatkan pengaruh mengenai doktrin tertentu dalam hal keagamaan. Hal ini tidak saja mempengaruhi moral anak, tetapi juga berdampak pada perilaku anak dalam dunia sosial. Informan menyatakan:

Anak-anak SD masih baik moralnya. Pada tingkat SMP dan SMA, moral anak-anak telah terpengaruh, karena era globalisasi anak-anak mendapat informasi sangat cepat dan ini berbahaya kalau tidak diawasi. Doktrin-doktrin agama banyak di internet melalui Youtube, doktrin agama kadang mengklaim Islam itu terbaik dan mendiskrimiasi agama lain. Padahal ada firman yang lain mengakui agama Yahudi dan Nasrani. Kita semua anak-cucu Nabi Adam, anak cucu Adam bukan hanya Islam, tapi kita semua yang ada di dunia ini. Hidup berdampingan dan saling menghargai telah diajarkan oleh leluhur kita.⁶

Sebagaimana ditunjukkan oleh informan di atas, moral anak usia SMP dan SMA telah terpapar oleh nilai-nilai negatif dari globalisasi. Nilai-nilai budaya dalam kebudayaan masyarakat Ternate, yang dikenal dengan *adat se atorang*, sudah kurang dikenal oleh generasi muda. Terutama anak-anak di usia sekolah SD hingga SMA. Nilai *adat se atorang* ini berkaitan dengan tata krama, tata susila, moral dan budi pekerti, ketataatan (*istiqomah*), dan sikap percaya kemampuan sendiri.

Saling keterkaitan antara unsur-unsur: doktrin agama, praktik pengajaran agama di sekolah, dan sikap dan perilaku intoleransi dianggap mempengaruhi pengalaman dan praktik keberagamaan. Karena itu, pendidikan multikultural yang melihat pengajaran nilai-nilai multikultural dan perilaku anak penting diperhatikan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tidak terdapat upaya atau proses pengajaran yang bertujuan memberikan doktrin tertentu kepada siswa. Sebaliknya, siswa justru mendapatkan pelajaran tentang pentingnya menghargai perbedaan di antara penganut agama berbeda. Hal ini tidak hanya berlaku dalam lingkungan sekolah, melainkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Tidak ada doktrin di sekolah. Guru tidak mengajarkan itu. Akan tetapi, kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang mengikuti perkembangan salah kaprah. Budaya luar sangat kuat dan tidak terbendung. Dahulu ada mata pelajaran Budi Pekerti. Sekarang sudah dihilangkan dan tidak diajarkan di sekolah. Padahal, kearifan lokal itu perlu dikembangkan. Pemerintah harus mengembalikan ini agar diajarkan kepada anak-anak mengenai ajaran moral.⁷

Munculnya perilaku siswa, atau anak-anak secara umum, disebabkan penetrasi teknologi informasi bagi kalangan ini. Selain itu, pengaruh budaya yang datang dari luar juga dianggap turut mempengaruhi atau membentuk perilaku anak. Budaya luar dianggap lebih kuat sehingga tidak bisa dibendung dan merasuki kehidupan anak-anak kita. Dengan berbagai sumber informasi serta pengaruh budaya yang datang dari luar ini, anak-anak menjadi salah kaprah dan mengacunya sebagai hal yang benar.

Era reformasi dianggap memiliki pengaruh negatif dalam pengalaman keberagamaan pada masyarakat Ternate. Pada era ini, terjadi perubahan dalam aspek-aspek adat dan budaya, kehidupan sosial, dan kehidupan remaja. Dekadensi moral dianggap terjadi dalam era reformasi ini. Dalam era reformasi juga keberagaman dalam hal agama muncul menjadi persoalan. Dikisahkan informan RD, kondisi toleransi dan tatanan adat sebelum era reformasi malah berjalan indah. Umat Islam dan Krsiten hidup berdampingan tanpa masalah—dalam hal perbedaan agama.

⁶ Wawancara H. Ridwan Dero, *Jou Kalem* Kesultanan Ternate, Tokoh Adat masyarakat Ternate

⁷ Wawancara H. Ridwan Dero, *Jou Kalem* Kesultanan Ternate, Tokoh Adat masyarakat Ternate

Setelah reformasi, agama-agama malah mengajarkan eksklusivitas bagi umatnya masing-masing. Pada sisi lain, juga berlangsung penghancuran pada tatanan adat dan budaya lokal. Sejalan dengan hal ini, informan menyatakan:

Sebelum reformasi, agama tidak menjadi persoalan, tidak membedakan satu sama lain. Di Ternate tahun 1960-1980an banyak terdapat guru-guru yang berasal dari Ambon dan mereka mayoritas beragama Kristen. Karena orang Ternate saat itu belum ada guru dan ini bukan suatu masalah karena doktrin agama tidak ada waktu itu. Dahulu toleransi antara umat beragama berjalan sangat indah, saling membaur satu sama lain. Ketika reformasi, semua tatanan adat dan budaya dalam kehidupan ini hancur. Kita mengalami dekadensi yang sangat luar biasa karena pengaruh dari luar sangat kuat. Padahal, semua tatanan kehidupan telah diajarkan dan ditinggalkan dalam bentuk dalil tifa "Eli-eli sosonyinga demo madero afa mara cobo sala demo kanang guraci no ige ua karabanga no bonofo". Artinya, kenang-kenanglah dan ingatlah kamu nasihat yang telah engkau terima jangan sampai salah berpegang pada pendapat sekarang ini emas tidak engkau elu-elukan tembaga engkau bangga-banggakan.⁸

Kebijakan dalam bidang pendidikan berasal dari level pemerintah pusat hingga pemerinrah daerah. Pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, mengatur hal-hal berkaitan kurikulum dan alokasi anggaran pendidikan dan penggunaannya. Selain itu, pemerintah juga menentukan buku-buku yang digunakan dalam mata pelajaran agama. Dalam hal buku pelajaran, sekolah atau guru dapat menambah jenisnya sesuai kebutuhan. Meski demikian, tetap ada buku wajib yang harus menjadi bahan utama dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Pemerintah Kota Ternate dianggap memiliki perhatian tinggi terhadap pendidikan agama Islam kepada anak-anak. Pada tingkat Taman Pendidikan Alquran (TPQ), pemerintah Kota Ternate mewisuda siswa hingga ribuan jumlahnya setiap tahun. Selain itu, seorang anak yang hendak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, seorang anak yang beragama Islam harus sudah mampu membaca dan menulis dalam huruf arab. Hal ini sesuai yang diungkapkan informan seperti berikut ini.

Pemerintah Kota Ternate punya konsentrasi yang luar biasa terhadap pendidikan dasar terkait dengan pelajaran agama. Dalam setiap Tahun kami mewisudakan anak-anak TPQ ribuan. Tapi, saya pernah katakan kepada wali kota, saat ini yang kita perlukan adalah kelanjutan dari pasca kita mewisudakan anak-anak yang belajar agama itu.⁹

Partisipasi masyarakat Kota Ternate dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai multikultural pada kalangan anak-anak tergolong baik. Salah satu bentuk praktik dari nilai multikultural ini diwujudkan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate. Di dalam kegiatan ini forum ini, anak-anak dari berbagai agama berbeda dilibatkan dalam kegiatan sosial secara bersama-sama. Selain terlibat bekerja secara bersama-sama, anak-anak di FKUBB juga dibiasakan untuk memiliki kepekaan sosial dengan memberikan bantuan kepada korban bencana dari kalangan penganut agama, etnis, asal-usul, yang berbeda-beda. Melalui cara ini, nilai-nilai multikultural dapat diwujudkan, menurut informan UM, seperti kutipan berikut ini.

⁸ Wawancara H. Ridwan Dero, *Jou Kalem* Kesultanan Ternate, Tokoh Adat masyarakat Ternate

⁹ Wawancara Bpk. H. Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, Pensiunan PNS Kantor Departemen Agama Kota Ternate.

Bahkan dalam suatu kegiatan tertentu, katakanlah itu hari-hari besar keagamaan, kami melibatkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Organisasi ini juga melibatkan anak-anak sekolah dasar untuk terlibat tentang pentingnya menghargai orang yang berbeda keyakinan melalui kerja bakti di tempat-tempat ibadah, tempat pemakaman, baik itu Kristen maupun Islam. Misalnya kalau itu bertepatan dengan Hari Natal, maka kami akan membersihkan gereja dan itu kami lakukan beberapa kali melalui forum itu. Tidak hanya itu, bahkan ada orang yang mengalami bencana alam, misalnya di Ambon. Artinya, upaya mereka untuk terlibat memberikan bantuan berupa santunan itu mereka lakukan, kalau mau dipikir mereka yang di Ambon sana mayoritas beragama Kristen, tapi anak-anak tidak melihat itu. Artinya, mereka tetap menganggap sesama manusia harus saling membantu, tidak memandang suku, agama dst. Hal seperti inilah merupakan perwujudan dari nilai-nilai multikulturalisme. Melalui praktik-praktik seperti itu.¹⁰

Perencanaan Pengajaran Mata Pelajaran Agama di Sekolah Dasar

Semua sekolah di Kota Ternate mengacu pada kebijakan nasional di bidang pendidikan. Kebijakan ini meliputi kurikulum dan buku-buku yang digunakan dalam pengajaran agama Islam. Berdasarkan dua hal ini, kurikulum dan buku ajar, perencanaan pengajaran pendidikan agama dipersiapkan. Hal ini berlaku pada sekolah umum dan sekolah swasta. Kurikulum yang digunakan adalah KTSP dan K13. Meski masih ada sekolah yang menerakan KTSP, tetapi pada 2020 semua SD diwajibkan untuk memberlakukan K13 dalam proses belajar mengajar pada semua mata pelajaran. Selain itu, variasi penggunaan kurikulum berbeda-beda di antara kelas. Sebagai contoh, salah satu SD di Kota Ternate menerapkan K13 untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5.

Penyusunan kurikulum dilakukan di bawah kementerian yang membawahi masing-masing jenis sekolah. Bagi sekolah agama, maka penyusunannya di bawah arahan Kementerian Agama. Melalui kelompok Kerja Guru (KKG), guru-guru bidang studi menyusun kurikulum sesuai bidangnya.

Sekolah Dasar Umum (Negeri)

Sekolah Dasar (SD) Negeri atau Swasta (SDN/S) menggunakan kurikulum KTSP dan K13 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui KKG. Materi pelajaran juga dilakukan secara seragam karena serentak secara nasional. Dalam penerapannya, guru-guru dapat menyesuaikan dengan memperhatikan kondisi lokal daerah.

Oh, kita di sd 39, belum seluruhnya sk 13. Sk 13 itu kelas 1,2, 4. Penyusunannya, kalau kita kan dari diknas. Karena sekolah umum. Tapi ada juga guru agama dari kemenag yang diperbantukan ke sekolah umum. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya di diknas. Tapi pada akhirnya tetap kita mengacu di kurikulum KTSP. Mengenai materi-materinya : materinya sama . karena inikan kurikulum nasional tarada. Kalau penyusunannya agak beda sedikit. Saya tidak ikut menyusun. Kurikulumnya dari sana. Nasional toh, jadi nanti kita yang terapkan, kita yang jalan. Ada praktik shalat, wudhu, tayammun , kelas mana yang dapat materi ini. Materinya ada tentang

¹⁰ Wawancara Bpk. H. Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, Pensiunan PNS Kantor Departemen Agama Kota Ternate.

kebersihan, bahkan ada praktek mandi besar. Itu ada semua. Kan shalat diawali dengan itu, mandi dulu, wudhu dulu, tayammun jadi harus bersih dulu. Selain agama, itu ada juga belajar baca tulis al-qur'an. Ada juga tambahan yaitu sekolah diniyah. Itu sama dengan ekstra kurikuler lagi. Itu diterapkan juga. Jadi setelah jam pelajaran selesai, toh, ada perpanjangan lagi. Nanti guru diniyah biasanya (yang ajar). Jadi nanti guru kelas yang jelaskan setelah jampelajaran selesai. Baru kita lanjut lagi.¹¹

Buku-buku pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan mata pelajaran lainnya, diperoleh melalui pembagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Buku-buku ini sama pada semua SD. Akan tetapi, setiap guru dapat menambahkan buku lain untuk memperkaya bahan ajar. Hal ini dapat berbeda bagi masing-masing guru karena sesuai kreativitas masing-masing guru. Khusus untuk buku penunjang ini, guru-guru bebas memilih dari berbagai penerbit yang ditetapkan oleh kementerian.

Ada buku dari Diknas. Kita dikaseh tarada. Selain itu ada buku-buku penunjang saya punya. Itu pilihan sesuai dengan materi toh, jadi tidak terfokus kepada buku ini saja. Apa yang dibutuhkan siswa di materi, kita melihat apa yang dibutuhkan sebagai kebutuhan atau tambahan. Masing-masing punya, kelas 4,5,6. Buku-buku penunjang toh. Penerbitnya berbeda. Itu tergantung guru agama pilih.¹²

Meski ada perbedaan antara kurikulum K13 dengan KTSP, tetapi dalam metode pengajarannya sama saja untuk semua mata pelajaran, termasuk pelajaran agama Islam. Secara umum, metode pengajaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal yang kurang dimengerti. Hal ini seperti diungkapkan informan berikut ini.

Cara mengajar SK13 dengan KTSP sama saja, yang beda kurikulumnya saja. Di depe cara belajar itu ada murid dikase kesempatan untuk bertanya. Itu sistem pembelajaran mengacunya seperti itu. Jadi siswa diarahkan. Kalau programnya, itu ada persemester ada tahunan. Itu RPP, kalau mata pelajaran agama, itu cara penyampaiannya sesuai dengan KD (Kompetensi Dasar) dengan SUB KD. Misalnya materi hari ini apa, misalnya tentang shalat. Toh, jadi 4 jam itu semua tentang shalat. KD-nya apa, materi fokusnya apa yang tentang shalat. Misalnya shalat itu diawali niat, takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.¹³

Sekolah Dasar Islam (Swasta)

Seperti halnya pada sekolah umum/negeri, pada SD Islam juga diterapkan kurikulum nasional. Namun, pada SD Alkhairaat, semuanya sudah menggunakan K13. Sekolah dan guru memiliki panduan yang seragam dalam pengajaran. Secara khusus, setiap guru mata pelajaran menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai mata pelajaran yang diajarkannya.

Pembelajaran Agama Islam di SD. Alkhairaat 04 Kalumpang semuanya mengacu pada kurikulum K13 yang diatur oleh pemerintah. Jadi semua sekolah dan guru memiliki panduan untuk mengajarkan anak didik. Untuk memudahkan proses pembelajaran, semua guru harus memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar mengarahkan guru dalam setiap proses belajar.¹⁴

¹¹ Wawancara Guru mata pelajaran Agama Islam pada SDN 39 Kota Ternate.

¹² Wawancara Guru mata pelajaran Agama Islam pada SDN 39 Kota Ternate.

¹³ Wawancara Guru mata pelajaran Agama Islam pada SDN 39 Kota Ternate.

¹⁴ Wawancara Guru Pendidikan Gama Islam di SD Alkhairaat Kota Ternate.

Sekolah Dasar Kristen (Swasta)

SD Katolik Santa Theresia Kota Ternate memiliki siswa dari berbagai agama, yakni Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu. Meski demikian, pelajaran pendidikan agama yang dilakukan hanya pelajaran agama Katolik saja. Dalam pelajaran teori di kelas, semua siswa dari berbagai agama ini mengikuti pelajaran sebagaimana siswa yang beragama Katolik.¹⁵ Dalam hal pelajaran tentang iman Katolik, guru agama hanya menekankan kepada siswa beragama Katolik saja.

Seperti halnya sekolah swasta Islam, SD Kristen (Katolik) di Kota Ternate mengacu pada K13. Materi pelajaran yang disusun dalam bentuk buku ajar disusun dan dibuat oleh guru agama Katolik di sekolah ini. Buku ajar dicetak dan tidak diedarkan untuk kalangan luas. Berdasarkan pengamatan terhadap materi-materi yang terdapat dalam buku ajar ini, sebagian besar mengandung nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan harmonisasi di antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Hal diakui oleh guru agama di sekolah itu sebagai materi ajar yang sudah diterapkan di sekolah itu sejak lama. Upaya ini dapat disebabkan oleh kondisi siswa yang memang terdiri dari berbagai agama, seperti disebutkan sebelumnya.

Kalau kitorang di sini, mengajar pake buku ajar yang dari ajaran Katolik. Tong mengajar sesuai dengan buku yang tong so biking sandiri. Jadi samua anak-siswa dong iko belajar di dalam kelas tentang agama Kristen Katolik. Dan selama ini tara ada keluhan dari siswa maupun orang tua siswa tentang mata pelajaran agama. Deng torang guru agama hanya mengajarkan kepada siswa tentang ajaran agama Kristen Katolik saja. Tapi tara ajak atau kase pengarung dorang untuk iko ajaran Katolik ini. Selama ini siswa sangat antusias ikuti belajar agama Katolik.¹⁶

Siswa selain agama Katolik, tetap dipantau praktik beribadahnya. Proses ini melibatkan orang tua dan tokoh agama masing-masing siswa. Misalnya siswa bergama Islam, kartu kontrol yang diberikan dari sekolah harus ditandatangani oleh imam mesjid tempat siswa melakukan sembahyang. Siswa muslim yang laki-laki diwajibkan melaksanakan ibadah shalat Jumat dan dikontrol dengan kartu tadi. Demikian juga untuk siswa bergama Hindu, Budha, dan Konghucu, masing-masing melaksanakan ibadah sesuai agamanya dan menunjukkan bukti ibadah melalui kartu kontrolnya. Guru agama akan memeriksa setiap kartu kontrol siswa pada saat pelajaran agama Katolik.

Praktik Pengajaran Mata Pelajaran Agama di Sekolah Dasar

Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, guru dituntut untuk kreatif dalam praktiknya di kelas. RPP mata pelajaran saja dianggap tidak cukup. Hal ini dianggap penting karena setiap jenjang kelas dan kondisi siswa bervariasi. Hal ini seperti diungkapkan informan berikut ini.

Metode pembelajaran merupakan proses yang penting dalam pembelajaran. Meskipun setiap guru telah dibekali dengan RPP, namun setiap guru harus kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini penting karena setiap kelas dan murid itu berbeda materinya. Contohnya kalau kelas itu lebih pada pengenalan huruf Hijaiah, cara membacanya dan pengenalan Nabi Muhammad SAW beserta para Nabi. Jadi setiap kelas itu

¹⁵ Metode ini tidak diprotes atau dihindari oleh orang tua siswa karena sejak awal antara orang tua dan pihak sekolah bersepakat dengan metode ini. Kesepakatan ini dilakukan di atas surat perjanjian antara kedua belah pihak.

¹⁶ Wawancara Guru Mata Pelajaran Agama Katolik, SD Katolik Santa Theresia Kota Ternate

*berbeda metode pembelajaran. Kalau kelas IV biasanya murid diajarkan untuk menghafal ayat-ayat pendek dan artinya. Saya juga memberikan contoh-contoh kasus terkait dengan ayat-ayat tersebut.*¹⁷

Praktik pengajaran mata pelajaran agama di SD Katolik Santa Theresia Kota Ternate memang menuntut upaya kreatif dari guru agama secara khusus, dan pihak sekolah secara umum. Kondisi siswa yang terdiri dari berbagai macam agama berbeda harus tetap mendapatkan pelajaran agama, sementara pihak sekolah hanya menyelenggarakan pendidikan agama Katolik saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar praktik pengajaran di kelas untuk mata pelajaran agama harus diramu sedemikian rupa sehingga setiap siswa dapat diarahkan dan dievaluasi pengetahuan dan praktik beragamanya.

Salah satu upaya kreatif dari pembelajaran agama di sekolah SD Katolik Santa Theresia Kota Ternate ini adalah mereka menciptakan sebuah lagu yang di dalam liriknya mencakup semua agama. Setiap anak menghafal dan menyanyikan lagu ini dengan riang. Lagu ini, pada intinya, mengajak perlunya mengenal berbagai agama serta pentingnya saling menghargai, saling menghormati, dan hidup damai dengan berbagai umat dari agama yang berbeda-beda.

Terkait dengan beberapa hal di atas, seorang informan yang merupakan guru agama Katolik di SD Katolik Santa Theresia mengatakan:

*Kalau praktek ibadah kami langsung ke gereja. Dan siswa yang bukan agama Katolik juga ikut masuk kedalam gereja untuk liat bagaimana praktek ibadahnya orang Katolik. Sedangkan siswa yang di luar agama Kristen Katolik, kami membuat kartu kontrol/buku mingguan. Buku mingguan ini mereka bawa pulang ke rumah lalu mereka bawa pada saat beribadah. Kartu kontrol itu sebagai bukti yang mereka tunjukkan kepada guru agama pada saat jam pelajaran agama di sekolah. Sebagai bukti bahwa mereka melakukan ibadah.*¹⁸

Multikulturalisme dan Budaya Lokal

Nilai-nilai multikultural dalam penelitian ini mencakup nilai tentang kesederajatan, keterbukaan, perlakuan yang sama, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, solidaritas, dan dialog. Selain itu, nilai yang juga menjadi perhatian penelitian adalah toleransi, kebersamaan, dan harmonisasi, dalam konteks perbedaan atau keragaman masyarakat. Secara khusus, berbagai nilai ini dilihat pandangan berbagai kalangan beserta praktiknya di lingkungan sekolah.

Nilai dan Praktik Multikultural di Sekolah

Upaya penanaman nilai-nilai multikultural beserta praktiknya diterapkan oleh sekolah-sekolah di Kota Ternate. Siswa diberikan materi tentang kehidupan antar-umat beragama, hubungan antarsuku bangsa, serta saling menghormati antarpenganut agama berbeda. Selain itu, nilai-nilai yang berkaitan dengan toleransi dan simpati kepada umat agama berbeda juga disampaikan kepada siswa. Bagi sekolah agama Islam, mata pelajaran agama Islam, misalnya mengutip ayat-ayat dalam Alquran yang memuat nilai-nilai toleransi. Siswa diberikan contoh-contoh nyata yang dekat dalam keseharian mereka. Seorang guru SD yang mengajar mata pelajaran Islam mengatakan:

Iya, nilai-nilai toleransi simpatik terhadap sesama, kami ajarkan pada siswa, tapi ini berlaku pada siswa kelas VI. Sikap toleransi yang diajarkan di

¹⁷ Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam di SD Alkhairaat Kota Ternate.

¹⁸ Wawancara Guru Mata Pelajaran Agama Katolik, SD Katolik Santa Theresia Kota Ternate

Alkhairaat itu bagian dari Q.S. Al-Kafirun dan Q. S. Al Maidah. Contohnya yang saya berikan terkait dengan toleransi hanya kepada sesama teman dan keluarga karena disini hanya terdapat siswa muslim. Mungkin saja di sekolah umum di ajarkan toleransi sesama umat satu dengan yang lain. Jadi semua yang kami ajarkan terkait dengan mata pelajaran agama, semua bersumber pada Al-Quran dan mencontohkan apa yang dilakukan oleh para Nabi.¹⁹

Di sekolah yang berbeda, dengan siswa mayoritas bergama Islam, para siswa juga diajari nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai ini berkaitan dengan pengetahuan dan sikap mengenai hubungan antarsuku bangsa, menghormati penganut agama lain, tingkah laku, menghargai orang tua, etika pergaulan dengan teman sesama penganut agama sama dan berbeda agama, hingga tata krama saat bertemu dengan siswa yang menganut agama berbeda. Terkait dengan hal ini, informan HI mengungkapkan:

Pendidikan antar umat beragama, pendidikan antarsuku itu sudah. Itu juga biasa di masyarakat, ada di tempat umum misalnya di mesjid. Itu di dalam pelajaran agama, ada ajaran untuk menghormati agama lain. Ini kan sistemnya tematik. Arahnya itu pembentukan karakter. Semua mata pelajaran mengarahkan kesitu. Baik PKn, Bahasa. Sejak kerusuhan itu, sudah jarang siswa Kristen. Itu pun 1-2 saja. Jadi anak-anak ini jarang bergaul dengan agama lain. Jadi kita arahkan pa dorang bahwa kita orang ini hidup beberapa agama. Jadi kita harus saling menghormati. Sebenarnya itu dari dulu lagi. Cuma kadang itu piya-piya saja. Sebenarnya itu pendidikan karakter itu pendidikan alam. Pendidikan alam itu pasti. Pendidikan tingkah laku. Tong kita bahasa alam atau bahasa kampung-kampung ini kan tingkah laku itu tabeat. Jadi kira-kira anak-anak itu tong arahkan kemana. Misalnya saling menghargai, menghargai orang tua, misalnya kepada orang tua bagaimana, cara sesama teman bagaimana toh, cara pergaulan bagaimana, cara menghormati bagaimana, itu diarahkan semua. Di materi itu ada, misalnya ketemu siswa yang beragama lain di luar itu bagaimana, itu torang sampaikan di kelas.²⁰

Pengajaran nilai-nilai multikultural secara mendalam tidak dilakukan pada siswa SD. Pada tingkatan ini, pelajaran agama Islam hanya memperkenalkan saja. Materi ini dianggap merupakan pelajaran yang diberikan pada tingkat SMP. Dengan mengacu pada kurikulum yang digunakan, maka pelajaran agama Islam di SD meliputi: pengenalan huruf, menulis, bacaan ayat pendek, keteladanan, tata cara shalat, hafalan dan memahami ayat-ayat pendek, sikap teladan para rasul dan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Meski tidak diajarkan secara mendalam melalui pelajaran mata pelajaran Agama Islam, siswa tetap mendapatkan materi tentang nilai-nilai keteladanan nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hal ini dinyatakan informan:

Untuk nilai keberagaman budaya pada tingkat SD, tidak diajarkan karena itu untuk pelajaran SMP. Karena semua mengacu pada kurikulum, jadi guru tidak boleh keluar dari pedoman pembelajaran, yang kami ajarkan pada anak-anak SD, selain pengenalan huruf, menulis, bacaan ayat pendek, keteladanan, tata cara shalat, hafalan dan memahami ayat-ayat pendek. Dan sebagian besar ayat-ayat yang diajarkan adalah sikap teladan para rasul dan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya.²¹

¹⁹ Wawancara Bu Aenan Kasuba, Guru Pendidikan Agama Islam SD Alkhairaat.

²⁰ Wawancara Bpk. Husen Ibrahim, Guru Pendidikan Agama Islam SD

²¹ Wawancara Bu Aenan Kasuba, Guru Pendidikan Agama Islam SD Alkhairaat.

Budaya Lokal Ternate dan Pendidikan Agama di Sekolah Dasar

Sistem nilai budaya orang Ternate yang dikenal dalam *adat se atorang* mengandung nilai yang sejalan dengan ajaran agama Islam. *Adat se atorang* pada dasarnya mencakup tata krama, tata susila, moral dan budi pekerti, ketataatan (*istiqomah*), dan sikap percaya kemampuan sendiri. Berbagai nilai ini mendukung dan sejalan dengan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan. Akan tetapi, beberapa dari nilai-nilai budaya dan nilai multikultural ini tergerus oleh proses global saat ini.

Anak-anak usia SD, menurut informan, masih tergolong baik dari sisi moral. Berbeda dengan anak usia sekolah tingkat SMP dan SMA, kalangan ini sudah terpengaruh arus informasi yang dibawa oleh globalisasi. Era yang ditandai dengan mudahnya akses kepada internet ini mempengaruhi sikap, perilaku, dan tindakan anak dalam kehidupannya. Dari internet, anak-anak memperoleh pengetahuan tentang doktrin tertentu yang kadang tidak sejalan dengan semangat agama itu sendiri. Anak-anak kadang mengklaim bahwa hanya agama Islam yang benar, sedangkan agama lainnya tidak. Anak lantas berperilaku diskriminatif terhadap penganut agama berbeda. Olehnya itu, anak-anak harus mendapat pengawasan dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Hal ini seperti pernyataan informan:

*Anak-anak SD masih baik moralnya. Pada tingkat SMP dan SMA, moral anak-anak telah terpengaruh, karena era globalisasi anak-anak mendapat informasi sangat cepat dan ini berbahaya kalau tidak diawasi. Doktrin-doktrin agama banyak di internet melalui Youtube, doktrin agama kadang mengklaim Islam itu terbaik dan mendiskrimiasi agama lain. Padahal ada firman yang lain mengakui agama Yahudi dan Nasrani. Kita semua anak-cucu Nabi Adam, anak cucu Adam bukan hanya Islam, tapi kita semua yang ada di dunia ini. Hidup berdampingan dan saling menghargai telah diajarkan oleh leluhur kita.*²²

Pelajaran agama di SD di Kota Ternate belum memuat secara khusus tentang nilai-nilai budaya Ternate. Hal ini disebabkan oleh kurikulum SD, baik mata pelajaran agama maupun pelajaran lainnya sudah ditetapkan secara nasional. Nilai-nilai budaya lokal dapat saja diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, tetapi pada mata pelajaran tertentu yang lain. Misalnya, mata pelajaran Muatan Lokal. Ternate memiliki kekayaan nilai budaya yang bersesuaian dengan pendidikan multikultural. Salah satu budaya dimaksud adalah sastra lisan yang dikenal dalam *dolo bololo*. Sangat banyak ungkapan atau petuah yang dikandung dalam *dolo bololo* ini, seperti dinyatakan informan berikut ini.

*... dolobololo: "Ngone doka dailoko ahu yo ma fara-fara ino fo rubu se fo rame doka saya rako moi". Artinya, kita bagaikan serumpun kehidupan hidup berpencar-pencar mari bersama dan beramai-ramai bagaikan indahnya seikat kembang. Ungkapan ini mengandung makna kehidupan kita dalam satu komunitas terdiri dari beragam suku, ras dan agama namun diusahakan kita bisa bersatu dan beramai-ramai menata kehidupan ini agar menjadi indah bagaikan seikat kembang yang berwarna warni. Ungkapan-ungkapan ini dahulu menjadi cermin bagi anak-anak dan saat ini tidak lagi kita temui karena tidak diajarkan di sekolah-sekolah.*²³

²² Wawancara H. Ridwan Dero, *Jou Kalem* Kesultanan Ternate, Tokoh Adat masyarakat Ternate

²³ Wawancara H. Ridwan Dero, *Jou Kalem* Kesultanan Ternate, Tokoh Adat masyarakat Ternate

Permasalahan Pendidikan di Sekolah Dasar

Dalam pengajaran agama Islam di sekolah, khususnya SD, terdapat tantangan yang dihadapi sekolah, yakni kemungkinan adanya ajaran sesat yang melanda siswa dan pengaruh internet (media sosial). Pandangan ekstrim yang disampaikan oleh lain, secara tidak bertanggung jawab, dapat sampai ke anak didik yang usianya masih sangat belia. Hal ini akan semakin rumit lagi jika orang tua dari siswa menganggap atau mengikuti paham tersebut. Informan menunjuk paham ISIS, terorisme, dan aliran Syia'ah Jafariah, sebagai beberapa contoh yang dianggap dapat menjadi permasalahan bagi pendidikan agama Islam di sekolah.

Perkembangan teknologi informasi, terutama melalui internet, memang tidak dapat dihindari. Setiap anak dengan mudah memiliki telepon seluler yang dibeli oleh orang tua mereka. Di satu sisi, hal ini dapat bernilai positif jika digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Sebaliknya, jika anak sudah menguasai dan mengakses berbagai isi dari media sosial dan terlepas dari pengawasan orang tua, maka teknologi dapat menjadi masalah.

Permasalahan lain terkait penyelenggaraan pendidikan (agama) adalah masalah anggaran pendidikan. Hal ini terutama dialami oleh SD Islam swasta. Bagaimanapun, dalam pengelolaan pendidikan secara optimal, pihak sekolah tetap membutuhkan anggaran. Apalagi jika guru agama Islam belum beesratus pegawai negeri sipil (PNS), maka sekolah harus memikirkan bagaimana cara membayar gaji/honor guru tersebut.

Model Pendidikan Multikultural Berbasis Budaya Lokal Ternate

Pendidikan multikultural yang dapat diartikan sebagai penanaman dan praktik nilai-nilai multikultural kepada siswa dalam pembelajaran di sekolah, dalam konteks pendidikan di Kota Ternate, sebenarnya dengan dapat diterapkan. Nilai-nilai budaya masyarakat Kota Ternate dan nilai-nilai yang terdapat dalam paham multikulturalisme sesungguhnya dapat berjumpa dan saling terintegrasi secara muda karena keduanya dapat berjalan seiring. Akan tetapi, kedua hal ini (tradisi lokal dan nilai multikultural) belum terwujud sebagai model bagi pendidikan SD di Kota Ternate karena kebijakan pendidikan pada level nasional.

Model pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam mata pelajaran Muatan Lokal. Materi-materi muatan lokal dapat mencakup percampuran antara nilai budaya lokal dengan ajaran agama, baik Islam maupun Kristen. Materi ajar tidak berisi ajaran keimanan atau menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan lebih pada aspek sosial agama. Aspek-aspek ini meliputi toleransi, kebersamaan, kepedulian, harmonis, kesederajatan, kebebasan berekspresi atau mengungkapkan pandangan, dan dialog secara terbuka.

PENUTUP

Proses perencanaan pengajaran agama Islam dan Kristen di SD Umum, Islam, dan Kristen di Kota Ternate dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bagi sekolah umum dan swasta, sedangkan SD Swasta Kristen mengacu kepada Kementerian Agama RI. Kurikulum hingga tahun 2019 ini yang diterapkan terdiri atas KTSP dan K13. Pada 2020 nantinya, semua sekolah harus menerapkan K13. Untuk menyiapkan pengajaran, guru bidang studi menyusun Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP). Guru dapat menyusun bahan ajar secara kreatif sepanjang masih mengikuti panduan kurikulum.

Proses praktik pengajaran agama Islam dan Kristen di SD Umum, Islam, dan Kristen di Kota Ternate dilakukan dengan ceramah tentang teori atau ajaran agama dan praktik. Pada sekolah umum/negeri dan Islam, teori-teori yang diajarkan

menyangkut keyakinan Islam dan berbagai tuntunan dalam kehidupan sosial. Praktik beribadah dilakukan dan dipantau dalam lingkungan sekolah. Pada sekolah Kristen, teori atau bahan pelajaran agama mencakup iman dalam agama Katolik. Materi pelajaran ini banyak memuat tentang toleransi dan nilai-nilai sosial. Bahan ini merupakan hasil ramuan dari guru agama karena siswa yang terdiri dari berbagai agama sehingga materi harus banyak mengenai toleransi. Dalam memantau praktik ibadah siswa yang tidak bergama Kristen, pihak sekolah melibatkan keluarga (orang tua) dan masyarakat (melalui tokoh agama di lingkungan di mana siswa tinggal).

Nilai-nilai multikultural berbasis budaya lokal di Ternate dalam pelajaran agama (Islam dan Kristen) belum diterapkan dalam materi pelajaran. Secara formal, kurikulum pendidikan nasional dianggap tidak memungkinkan terjadinya hal ini. Akan tetapi, jalan lain sangat terbuka jika sekolah mengajarkan pelajaran Muatan Lokal.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka dapat direkomendasikan hal-hal yaitu pihak sekolah perlu menggalakkan nilai-nilai multikultural kepada siswa melalui pembelajaran agama, pemerintah sebaiknya menjadikan pelajaran Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang wajib ada/diajarkan di sekolah yang isinya memuat berbagai sistem nilai, sistem sosial, dan karya budaya masyarakat Ternate, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai multikultural, partisipasi masyarakat dalam turut menumbuhkan nilai-nilai multikultural di sekolah dasar diwujudkan melalui organisasi lintas agama, yakni Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Referensi

- Candra, Novi. 2019. "Pendidikan Agama dan Keadaban Sosial", makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Agama dan Harkat Kemanusiaan di Era Sintesis*, yang diselenggarakan oleh ICRS UGM dan AIPI, di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2019.
- Denzin, N. K., dan Lincoln, Y. S. 2009. "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.) *Handbook of Qualitative Research*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huberman, A. M., dan Miles, M. B. 2009. "Manajemen Data dan Metode Analisis", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.) *Handbook of Qualitative Research*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm 591-612.
- Inglis, C. 1996. "Multiculturalism, NewPolicy Responses ti Diversity", dalam *MOST. Policy Papers No. 4*. Paris; UNESCO.
- Latif, Yudi. 2019. "Wawasan Kebangsaan," makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Agama dan Harkat Kemanusiaan di Era Sintesis*, yang diselenggarakan oleh ICRS UGM dan AIPI, di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2019.
- Lubis, A.Y. 2004. "Memahami 'Cultural Studies' dan Multikulturalisme dari Perspektif Pascamodern", dalam *Jurnal Wacana* Vol 6(2): 103-131.
- Mahathera, Nyanasuryanadi. 2019. "Dhamma, Pendidikan dan Perubahan Sosial," makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Agama dan Harkat Kemanusiaan di Era Sintesis*, yang diselenggarakan oleh ICRS UGM dan AIPI, di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2019.
- Mulia, Musdah. 2019. "Agama dan Martabat Kemanusiaan", makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Agama dan Harkat Kemanusiaan di Era Sintesis*, yang diselenggarakan oleh ICRS UGM dan AIPI, di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2019.

- Murray Li, Tania. ^L_{SEP}2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Margin Kiri.
- Poespowardojo, S. 2000. "Kritik Budaya dalam Rangka Memasuki Abad Baru", dalam *Jurnal Wacana* Vol. 2(1): 1-17.
- Robinson, K. 2000. "Ketegangan Antarsukubangsa, Orang Bugis, dan Masalah 'Penjelasan'", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 63: 44-52.
- Silverman, D. 2006. *Qualitative Research: Theory, Method and Practice (Second Edition)*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Singgih, Pdt. E. G. 2002. "Etnisitas dan Identitas: Sebua Pengantar" dalam Ubed S. Abdillah, *Politik Identitas Etnis. Pergaulan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatera, hlm.: ix-xii.
- Spencer, M. E. 1994. "Multiculturalism, "Political Correctness," and the Politics of Identity", dalam *Jurnal Sociological Forum*, Vol. 9, No. 4, pp. 547-567.
- Sumar-Karman, A., Abdulrahman, S., Arlinah, Wildan, Pora., Syahyunan. 2013/2014. *Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Maluku Utara. Laporan Penelitian*. Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara.
- Syamsiyatun, Siti. 2019. "ICRS: Solusi Hulu Pendidikan Lintas Iman", makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Agama dan Harkat Kemanusiaan di Era Sintesis*, yang diselenggarakan oleh ICRS UGM dan AIPI, di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2019.
- Ubaidillah, Abdillah S. 2002. *Politik Identitas Etnis. Pergaulan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatera.
- Wahyu, Prof., Dr., M.S. 2017. *Membangun Pendidikan*. Banjarmasin: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.